

Analisis Pengaduan Bulan Maret 2026



Diagram di atas menunjukkan perbandingan aduan yang telah selesai dan yang masih proses. Dari 13 aduan yang masuk, 10 Aduan Terselesaikan dan 3 masih dalam proses

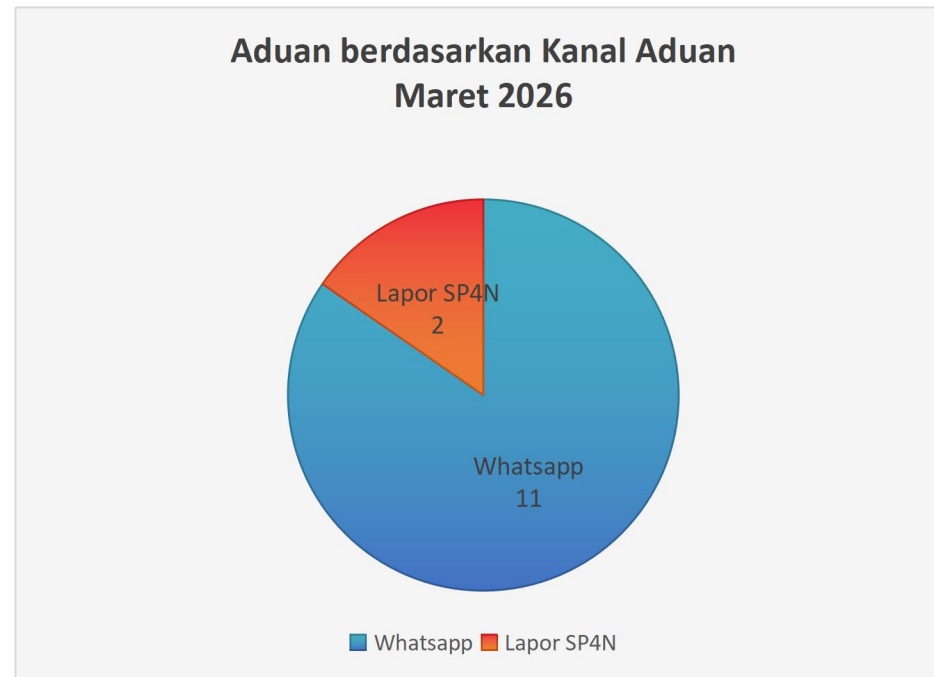


Diagram di atas menunjukkan Jumlah aduan berdasarkan kanal aduan. Dibulan Maret kanal aduan Whatsapp menjadi kanal terbanyak yang mendapatkan aduan sebanyak 11 aduan dan Kanal SP4N LAPOR mendapatkan 2 aduan.

Laporan Pengaduan per OPD bulan Maret 206

LAPORAN PENGADUAN MARET TAHUN 2026					
Nomor	opd	akronim	JUMLAH	PROSES	SELESAI
1	DINAS PERHUBUNGAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Dishub PKP	3	1	2
2	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	Kornidag	2	0	2
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dukcapil	2	0	2
3	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinsos PPPA	1	0	1
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PUPR	1	0	1
5	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Kominfo	1	0	1
7	BADAN KEUANGAN DAERAH	Bakeuda	1	0	1
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BPBD	1	1	0
34	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Perinaker	1	1	0
9	SEKRETARIAT DPRD	Setwan	0	0	0
10	SEKRETARIAT DAERAH	Setda	0	0	0
11	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN	Satpol PPK	0	0	0
12	RSUD PANGGUL	RSUD Panggul	0	0	0
13	RSUD DR. SOEDOMO	RSUD	0	0	0
14	POSKO GERTAK	Posko Gertak	0	0	0
15	PDAM	PDAM	0	0	0
16	KECAMATAN WATULIMO	Watulimo	0	0	0
17	KECAMATAN TUGU	Tugu	0	0	0
18	KECAMATAN TRENGGALEK	Trenggalek	0	0	0
19	KECAMATAN SURUH	Suruh	0	0	0

20	KECAMATAN PULE	Pule	0	0	0
21	KECAMATAN POGALAN	Pogalan	0	0	0
22	KECAMATAN PANGGUL	Panggul	0	0	0
23	KECAMATAN MUNJUNGAN	Munjungan	0	0	0
24	KECAMATAN KARANGAN	Karangan	0	0	0
25	KECAMATAN KAMPAK	Kampak	0	0	0
26	KECAMATAN GANDUSARI	Gandusari	0	0	0
27	KECAMATAN DURENAN	Durenan	0	0	0
28	KECAMATAN DONGKO	Dongko	0	0	0
29	KECAMATAN BENDUNGAN	Bendungan	0	0	0
30	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kesbangpol	0	0	0
31	INSPEKTORAT	Inspektorat	0	0	0
32	DINAS PETERNAKAN	disnakan	0	0	0
33	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Pertapan	0	0	0
35	DINAS PERIKANAN	Perikanan	0	0	0
36	DINAS PENDIDIKAN	Disdik	0	0	0
37	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PMPTSP	0	0	0
38	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Dispora	0	0	0
39	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PMD	0	0	0
40	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Disparbud	0	0	0
41	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Dis LH	0	0	0
42	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinkes - PPKB	0	0	0
43	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Disippus	0	0	0
44	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappedalitbang	0	0	0
45	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BKD	0	0	0
			13	3	10

Laporan Pengaduan bulan Maret 2026 menunjukkan dinamika pelayanan publik yang terus bergerak dengan total 13 aduan yang masuk ke berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dibandingkan dengan data bulan sebelumnya, komposisi instansi yang menerima keluhan mengalami pergeseran yang cukup signifikan.

Analisis Statistik dan Kinerja

Secara kuantitatif, Dishub PKP (Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman) menempati urutan tertinggi dengan 3 aduan. Di bawahnya, terdapat Komidag (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan) serta Dukcapil yang masing-masing menerima 2 aduan. Instansi lain seperti Dinsos PPPA, PUPR, Kominfo, Bakeuda, BPBD, dan Perinaker masing-masing mencatatkan 1 aduan.

Dari sisi efisiensi penyelesaian, rapor kinerja Maret 2026 terlihat cukup solid:

- Tingkat Penyelesaian: Sebanyak 10 aduan (77%) telah berhasil diselesaikan dengan status "Selesai".
- Aduan dalam Proses: Masih terdapat 3 aduan (23%) yang sedang ditindaklanjuti, yaitu pada Dishub PKP, BPBD, dan Perinaker (masing-masing 1 aduan).
- Efektivitas Instansi: Komidag dan Dukcapil patut diapresiasi karena berhasil menuntaskan seluruh laporan yang masuk (100% clearance rate).

Kesimpulan

Analisis sederhana menunjukkan bahwa isu-isu terkait perhubungan, pemukiman, dan perdagangan menjadi sorotan utama masyarakat pada bulan Maret ini. Menariknya, instansi yang bulan lalu memiliki beban laporan tinggi seperti RSUD, kini mencatatkan nol aduan, yang bisa mengindikasikan adanya perbaikan layanan atau peralihan fokus keluhan masyarakat ke sektor infrastruktur dan ekonomi.

Secara keseluruhan, pemerintah daerah menunjukkan responsivitas yang baik dengan menyelesaikan mayoritas laporan di bulan yang sama. Namun, adanya tunggakan di sektor BPBD dan Perinaker perlu menjadi perhatian agar tidak menjadi beban di bulan April, mengingat sektor bencana dan tenaga kerja seringkali bersifat mendesak. Transparansi data ini membuktikan bahwa kanal pengaduan warga berfungsi sebagai instrumen evaluasi diri bagi tiap OPD untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.